

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013.
- Bryan A, Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1959.
- FX. Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*, STPN Press, Yogyakarta, 2015.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Cet.4*, PT. Gelora Aksara Pratama, 1996.
- Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1982.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana, Yogyakarta, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Martin Roestamy, *Konsep-Konsep Kepemilikan Properti Bagi Asing*, PT Alumni, Bandung, 2011.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra A Badin, Bandung, 1977.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Santjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- , *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian Cet. XIII*, Intermasa, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- , *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta, 1998.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Cet. I, Yogyakarta, 2009.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973.
- , *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Cet. 8*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2013.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.

TESIS/DISERTASI/JURNAL

Azhari, M. Edwin. 2018. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing di Lombok. *Jurnal Akta*, 5 (1), 2018.

Dewi Masithoh, *Akibat Hukum Perjanjian Nominee Dalam Jual Beli Tanah Hak Milik oleh Orang Asing di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN.Dps)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

Deby Meilani Beta Marbun, *Analisis Hukum Perjanjian Nominee Dalam Pembelian Tanah Oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan No. 3200 K/PDT/2014)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Gunawan Widjadja, *Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik*, dalam *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Volume III Edisi 4, Agustus-Desember 2008.

Hamdaliah, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah*, LamLaj, Volume 1 Issue 2, September 2016.

Maria S.W. Soemardjono, *Penguasaan Tanah oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee*, Rapat Kerja Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Wilayah Bali dan NTT, Denpasar, 2012.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Nizar Fitriadi, *Praktik Jual Beli Tanah Nominee Milik Warga Negara Asing dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Tanah Nominee*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Natalia Christine Purba, *Keabsahan Perjanjian Innominat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Norentia Ekumning Sari, Suhariningsih, Abdul Madjid, *Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang Telah Didahului Perjanjian Nominee dengan Warga Negara Asing*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 2 Agustus 2021.

Ridwan Mutaqin dan Deny Haspada, *Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Serly Primadani, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Nominee Agreement (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 82/PDT.G/PN.DPS)*, 2016.

Yanly Gandawidjaja, *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3200 K/Pdt/2014 tanggal 9 Juni 2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.